Indigenous Knowledge

Volume 3 Number 2 (2024), December
E-ISSN: 2746-3662
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia

Durriyya Senja Tiarylla[1], Lintang Untsa Azhima[2], Yunita Alyanika Saputri[3]

[123] *Faculty of Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta*
Corresponding author's email: senjatiarylla@student.uns.ac.id , bylintanguntsa@student.uns.ac.id , alyasasaputri@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas bagaimana Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pancasila menjadi dasar bagi setiap aspek penegakan hukum di Indonesia. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang apa itu Pancasila, apa fungsi dan kedudukannya, serta nilai-nilai yang terkandung dalam sila-silanya dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jurnal ini juga membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai dasar negara dalam berbagai bidang, seperti dalam menjaga bangsa Indonesia tetap hidup, dan dalam membentuk konstitusi baru.

Kata kunci: Dasar Hukum; Dasar Negara; Kehidupan Bernegara; Nilai-nilai Pancasila; Pancasila

1. Pendahuluan

Sebagai ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila telah menjadi pilar penting dalam pembentukan dan pengaturan kehidupan bernegara. Hal ini ditunjukkan oleh kedudukannya yang diakui secara luas dan terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila telah diakui sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 dan telah memainkan peran besar dalam membangun sistem hukum, pemerintahan, dan nilai-nilai sosial yang mengatur kehidupan di Indonesia.

Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, tetapi masih ada banyak kesulitan dan masalah dalam menerapkannya. Salah satu masalah utama adalah seberapa besar pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila telah berdampak pada kebijakan dan praktik di berbagai bidang, seperti hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Perubahan sosial, modernisasi, dan pengaruh global juga dapat mempengaruhi cara Pancasila diinterpretasikan dan diterapkan dalam masyarakat. Akibatnya, untuk memastikan bahwa Pancasila tetap relevan dalam memandu kemajuan negara Indonesia, sangat penting untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan menemukan solusi yang tepat. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai Pancasila, serta untuk mengeksplorasi peran, makna, dan prinsip-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan arahan terhadap peningkatan dan kemajuan di masa yang akan datang.

2. Pengertian Pancasila

Salah satu konsep dasar negara yang sangat penting dalam kehidupan bernegara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila digunakan sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, memiliki kekuatan hukum untuk mengikat semua penduduk Nusantara.

Dalam UUD 1945, Alinea IV menyatakan bahwa "kemudian dari pada itu dengan ini disahkan Kemerdekaan Indonesia, dan untuk melindungi serta mempertahankan Tanah Air Indonesia, serta seluruh Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menunjukkan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami gagasan Pancasila sebagai dasar negara serta cara penerapan gagasan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagai landasan negara, Pancasila memiliki peran yang krusial dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan pemerintahan di Indonesia. Meskipun begitu, terdapat hambatan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsipnya.

I. Implementasi Pancasila

a. Sebagai landasan prinsip bagi negara dan masyarakat, Pancasila dirumuskan sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup itu sendiri, Pancasila perlu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui tindakan maupun sikap yang kita tunjukkan.

b. Sebagai dasar hukum: Pancasila ditetapkan sebagai dasar hukum Indonesia, dan ia harus diterapkan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum.

c. Sebagai landasan filosofi negara Republik Indonesia, Pancasila telah diresmikan sebagai dasar. Sebagai dasar filosofi ini, Pancasila harus digunakan untuk membangun kebijakan dan fungsi negara.

II. Tantangan Implementasi Pancasila

a. Tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan benar: Salah satu masalah dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah tidak menerapkan

nilai-nilainya dengan benar. Hal ini dapat terjadi di banyak tempat, seperti di pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat.

b. Pengaruh budaya luar: Pengaruh budaya luar dapat mempengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila dan membuat masyarakat menjadi lebih individualis. Ini juga dapat mengurangi rasa nasionalisme dan patriotisme masyarakat.
c. Era digital: Era digital dapat menimbulkan masalah tambahan yang dapat memengaruhi penerapan prinsip-prinsip Pancasila. Teknologi saat ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari luar negeri yang mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
d. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat: Satu masalah tambahan adalah masyarakat mungkin tidak memahami dan tidak menyadari prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya prinsip-prinsip ini dan tidak mengimplementasikannya dalam keseharian.

4. Pancasila sebagai Sumber Nilai

Pancasila dijadikan sebagai asal nilai dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan pemerintahan bagi masyarakat Indonesia. Pancasila diterapkan di segala lapisan masyarakat, negara, dan bangsa sebagai norma etika dan acuan untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian perilaku, tindakan, dan sikap warga Indonesia.

Analisis Pancasila didasarkan pada keberadaan Tuhan, manusia, masyarakat, dan keadilan, sehingga nilai-nilainya bersifat obyektif karena merupakan nilai-nilai esensial yang mengandung prinsip-prinsip universal yang dapat diukur secara obyektif.

Para perintis negara merumuskan Pancasila, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip inti sebagai landasan negara. Untuk menjelaskan, ada elemen yang disebut sebagai nilai prinsipal, nilai alat, dan nilai operasional dalam kerangka nilai kehidupan nasional.

a. Prinsip-prinsip dasar yang kita yakini sebagai landasan berasal dari nilai-nilai mendasar yang bersumber dari budaya, sesuai dengan konstitusi 1945 yang mencerminkan inti budaya.
b. Nilai Instrumental: Nilai-nilai ini biasanya berasal dari nilai-nilai sosial atau hukum, yang kemudian akan dibentuk menjadi lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan tempat dan waktu.
c. Nilai-nilai Praktis: Nilai-nilai ini adalah nilai yang sebenarnya kita gunakan dalam pernyataan. Nilai-nilai ini menunjukkan apakah nilai-nilai dasar dan instrumental benar-benar hilang dalam masyarakat. Kehidupan berbangsa didasarkan pada nilai yang ada pada Pancasila. Nilai-nilai ini termasuk nilai sosial, ideal, material, positif, dan logis.

I. Makna Nilai-nilai yang Terkandung Dalam Pancasila

Kita memiliki landasan negara yang otentik, bukan jiplakan dari luar. Komponen-komponen Pancasila bersumber dari beragam agama, keyakinan, tradisi, dan budaya. Karena terdapat nilai-nilai moral dalam agama dan budaya tersebut, Pancasila juga mencerminkan nilai moral.

a. Peran nilai dalam masyarakat: Nilai-nilai adalah hal yang bernilai, bermanfaat, estetis, dan memperkaya jiwa yang memungkinkan manusia untuk menyadari martabat dan kedudukannya. Nilai-nilai merupakan unsur penting dalam kebudayaan, bersama dengan struktur sosial dan karya seni.
b. Peran etika dalam masyarakat: Etika adalah panduan mengenai kebaikan dan kejahatan yang terkait dengan perilaku manusia. Seseorang dianggap cocok dan berperilaku secara etis jika mereka mengikuti norma, peraturan, dan tradisi masyarakatnya. Etika bisa merujuk pada peraturan dan prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia.

II. Makna Nilai Dalam Pancasila

Nilai adalah ukuran, standar, dan keyakinan masyarakat. Nilai membantu seseorang memahami interaksi dengan orang lain dan bagaimana mereka bertindak. Banyak orang di masyarakat menganut nilai-nilai yang mendefinisikan apa yang benar dan baik untuk dilakukan.

a. Nilai Ketuhanan: Ini berarti bahwa bangsa mengakui dan percaya bahwa ada tuhan yang menciptakan alam semesta.
b. Prinsip Kemanusiaan: Berdasarkan tuntutan hati nurani, memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan sosial.
c. Nilai Kesatuan: mengacu pada upaya untuk menyatukan semua orang dalam kesatuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme.
d. Nilai Kerakyatan: Menunjukkan bahwa pemerintahan dilakukan oleh rakyat, dan untuk rakyat melalui perundingan dan persetujuan melalui lembaga perwakilan.
e. Nilai Keadilan: Ini berfungsi sebagai dasar dan tujuan, menunjukkan masyarakat yang adil dan makmur secara fisik dan mental.

III. Nilai-nilai setiap Butiran Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
    a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
    b. Orang-orang Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka sendiri, serta menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
    c. Mendorong sikap menghargai, penghargaan, dan kolaborasi antara individu yang menganut agama lain serta orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

d. Membangun harmoni dalam interaksi antaragama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Mahakuasa.
e. Kaitan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa melibatkan isu-isu agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Esa.
f. Menumbuhkan rasa saling menghormati atas kebebasan masing-masing untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
   a. Menghormati setiap individu sesuai derajat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Menyatakan bahwa semua individu memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai dasar, tanpa memperhatikan agama, keturunan, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial, atau warna kulit.
   c. Menciptakan perasaan kasih sayang.
   d. Mendorong perkembangan sikap empati dan keserasian.
   e. Menumbuhkan rasa hormat yang menghargai dan bekerja sama dengan orang dari negara lain
   f. Menjaga prinsip kemanusiaan.
   g. Memiliki keinginan untuk membantu orang lain.
   h. Menunjukkan sikap yang adil dan bijaksana terhadap sesama.
   i. Berani mempertahankan keadilan dan kebenaran.
3. Persatuan Indonesia
   a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
   b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan.
   c. Menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme.
   d. Menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme Indonesia.
   e. Menjaga ketertiban global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian permanen, dan keadilan sosial.
   f. Meningkatkan pergaulan yang bertujuan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
   a. Semua individu Indonesia merupakan bagian dari warganegara dan komunitas, serta memiliki hak dan kewajiban yang sejajar.
   b. Harus menghindari memaksakan pendapat pribadi.
   c. Memberikan prioritas kepada upaya berunding dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.
   d. Semangat kekeluargaan mendorong perundingan untuk mencapai kesepakatan.
   e. Menghargai dan menghormati setiap keputusan yang dibuat melalui perundingan.

f. Dengan niat dan kewajiban yang sungguh-sungguh, menerima dan menjalankan hasil kesepakatan musyawarah.
g. Keutamaan diberikan pada kepentingan kolektif daripada kepentingan individu atau kelompok.
h. Musyawarah dilakukan dengan bijak dan berdasarkan moral yang luhur.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
   a. Mendorong tindakan yang terhormat yang mencerminkan nilai-nilai keluarga dan semangat gotong-royong.
   b. Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab harus terjaga.
   c. Tidak menggunakan hak milik dalam bahaya kepentingan umum.
   d. Menghindari memanfaatkan kepemilikan barang untuk mengeksploitasi individu lainnya.
   e. Menjunjung tinggi hak orang lain.

5. Kesimpulan

Fungsi utama Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia adalah membentuk dan mengatur kehidupan bernegara. Pancasila, yang ditetapkan dalam UUD 1945, memiliki kekuatan hukum untuk mengikat semua penduduk Indonesia. Pada aktivitas sehari-hari, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila, seperti pengakuan akan Tuhan Yang Maha Esa, perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap sesama manusia, kesatuan Indonesia, prinsip kerakyatan yang dijalankan dengan kebijaksanaan dan perwakilan, serta menciptakan keadilan sosial.

Dalam situasi seperti ini, Pancasila dapat digunakan sebagai dasar negara dalam berbagai hal, seperti menjaga kelangsungan bangsa Indonesia dan membentuk konstitusi baru. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk kebijakan, pemerintahan, nilai sosial, dan sistem hukum yang mengatur kehidupan di Indonesia.

Referensi

Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Jurnal Konstitusi, 15(1), 21-49.

Hadiwijono, A. (2016). Pendidikan Pancasila, eksistensinya bagi mahasiswa. Jurnal Cakrawala Hukum, 7(1), 82-97.

Imran, M. R. C. (2020). Makalah Pendidikan Pancasila "Nilai-Nilai Pancasila", 7-8.

Kurnisar, K. (2011). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum di Indonesia. Media Komunikasi FPIPS, 10(2).

Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 3(1), 88-94.

Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN, 7(1), 53-58.

Soeprapto, S. (2016). Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Ber Masyarakat Berbangsa Dan Bernegara. Jurnal Ketahanan Nasional, 10(2), 17-28.

Susanto, S. (2017). Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa Dan Bernegara. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(1), 44-52.